

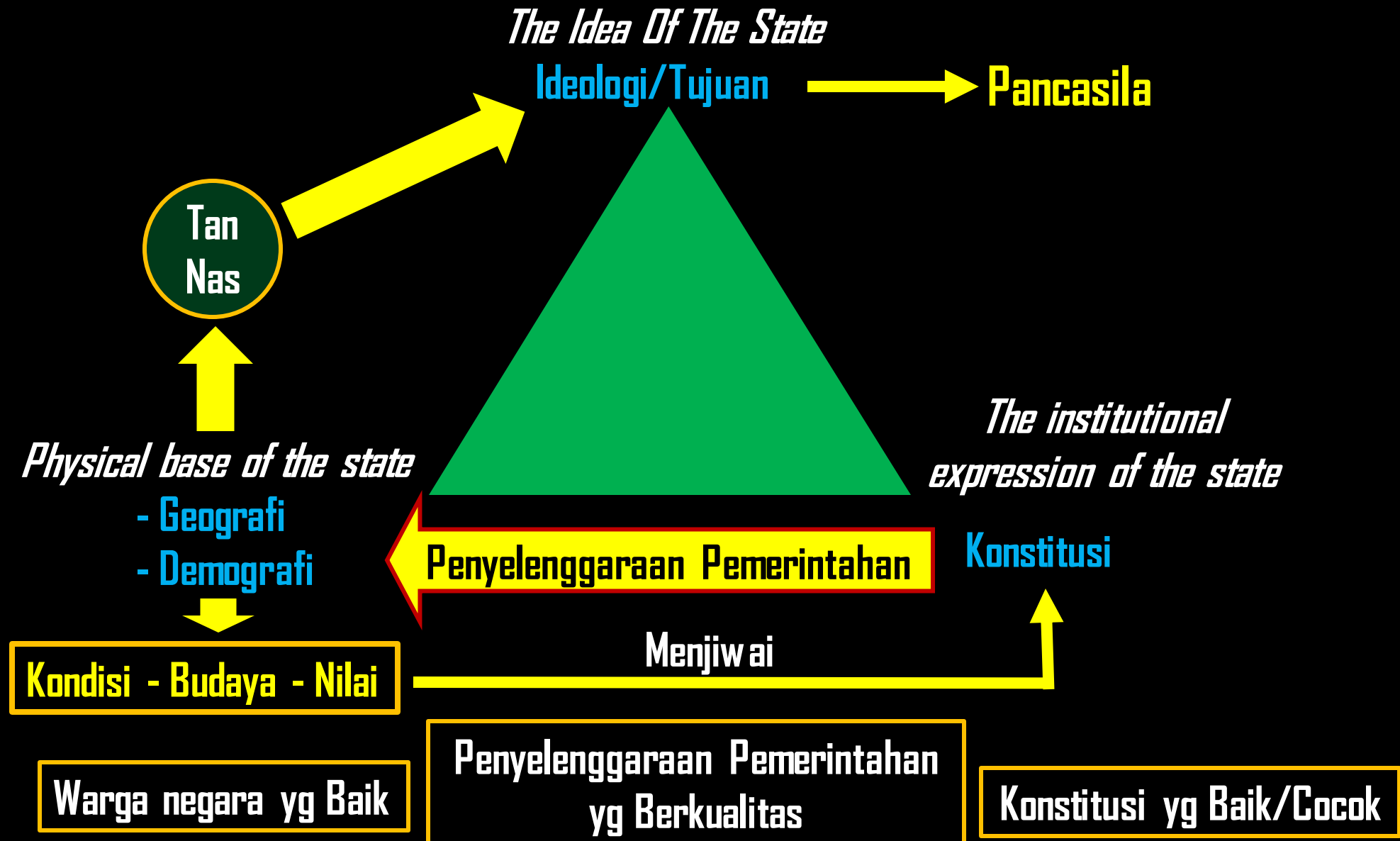


# **KORELASI ANTARA KONSTITUSI**

**&**

# **KETAHANAN NASIONAL**

# Barry Buzan; *"People, State and Fear"* (1983)



# Konteks Indonesia



## Geografis

Ngr  
Kep

Ltk  
Stra

Kaya  
SDA

## Demografis

Jmlh  
Pddk

Maje  
muk

Penye  
baran

## Pancasila

- Dasar Negara
- Pandangan Hidup Bangsa
- Pemersatu Bangsa

## Negara Bangsa – Negara Kesatuan

## Sistem Pemerintahan...??

Diprediksi  
Akan Terjadi  
Multi Partai

- Tdk ada Parpol > 50%
- Posisi ~~posisi~~ di Parlemen le~~le~~ & sulit gulirkan pemerintahan
- Mudah dijatuhkan

## Presidensial...??

## Parlementer...??

- Tdk ada Parpol > 50%
- Sulit Mem~~br~~uk Pemerintah
- Pemerintah labil
- Kabinet mudah jatuh

Politik Dagang Sapi

Mahal/gangguan pol → tdk efektif

## Sistem Sendiri / MPR (Sist Pemerintahan Berdasar Pancasila)

# Pedoman Pokok Dlm Membangun Konstitusi Berdasar Pancasila



1. "Negara" – begitoeboenjinja – melindoengi segenap bangsa Indonesia dan seloeroehtoempah darah Indonesia dengan berdasar atas persatoean dengan mewedjoedkan keadilan sosial bagi seloeroeh rakjat Indonesia. Dalam "pemboekaan" ini diterima aliran pengertian **negara persatoean, negara jang melindoengi dan melipoeti segenap bangsa seloeroehnya. Djadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan,** negara, menoeroet pengertian "pemboekaan" itoe menghendaki persatoean, melipoeti segenap bangsa Indonesia seloeroehnja. Inilah soeatoe dasar negara jang tidak boleh diloepakan.

2. **Negara** hendak mewedjoedkan keadilan sosial bagi seloeroeh rakjat.

3. Pokok jang ketiga jang terkandoeng dalam "pemboekaan" ialah negara jang berkedaelatan rakjat, berdasar atas kerakjatan dan permoesjawaratan perwakilan. Oleh karena itoe **sistim negara jang terbentoeck dalam Oendang-Oendang Dasar haroes berdasar atas kedaelatan rakjat dan berdasar atas permoesjawaratan perwakilan.** Memang aliran ini sesoeai dengansifat masjarakat Indonesia.

4. Pokok pikiran jang keempat, jang terkandoeng dalam "pemboekaan" ialah negara berdasar atas Ketoehanan Jang Maha Esa menoeroet dasar kemanoesiaan jang adil dan beradab. Oleh karena itoe **Oendang-Oendang Dasar haroes mengandoeng isi jang mewadjibkan Pemerintah dan lain-lain penjelenggara negara, oentoeck memelihara boedi pekerti kemanoesiaan jang loehoer dan memegang tegoehtjita-tjita moral rakjat jang loehoer.**

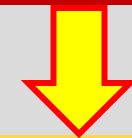
Persatuan Bangsa



Keadilan Sosial



Kerakyatan /Demokrasi Perwakilan



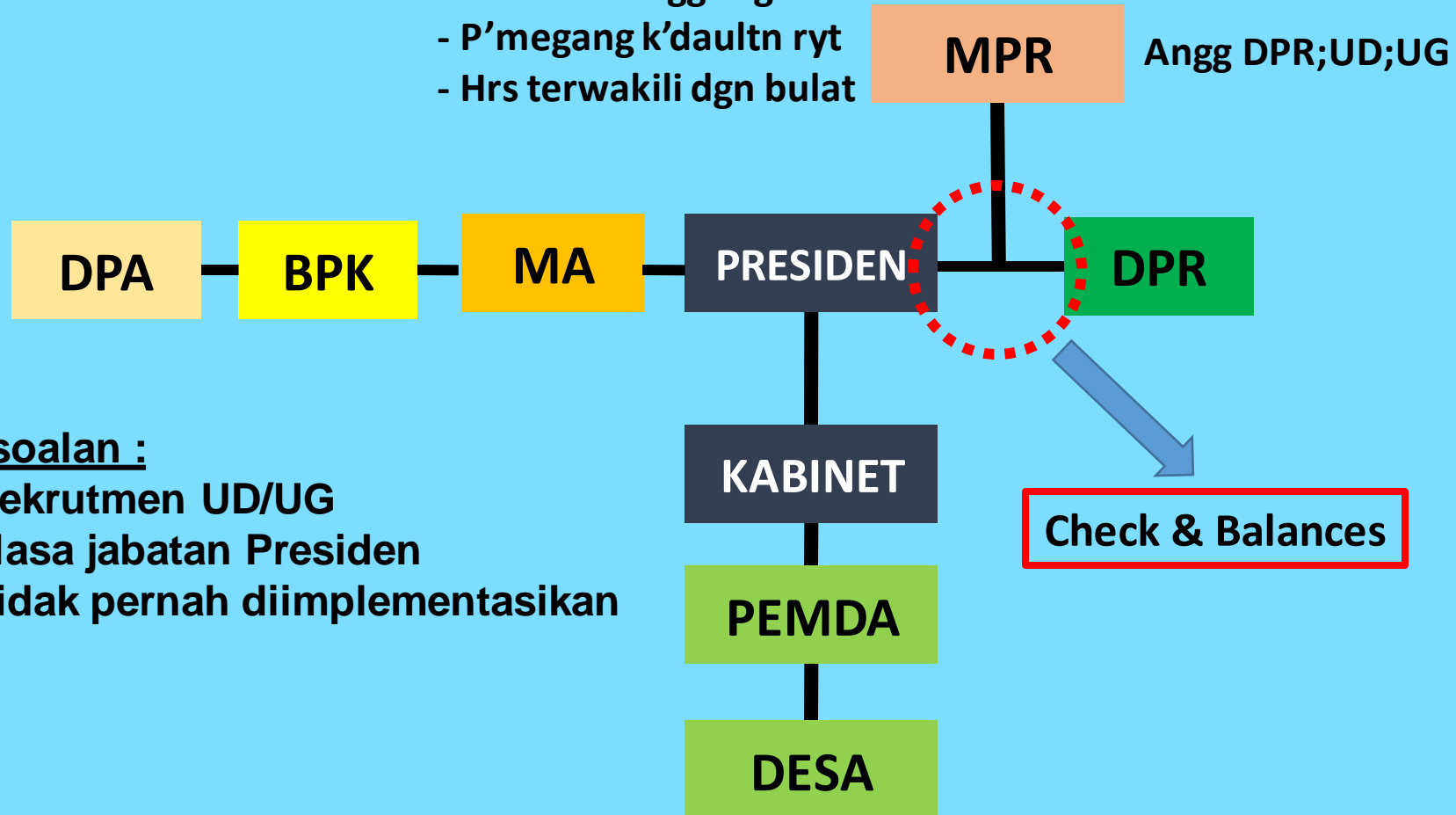
Budi Pekerti Luhur Berdasar Ketuhanan YME & Kemanusiaan...



# Sistem Kenegaraan Yang Dijawai Pancasila (Sistem Sendiri)



- Lemb Tertinggi Ngr
- P'megang k'daultn ryt
- Hrs terwakili dgn bulat



## Persoalan :

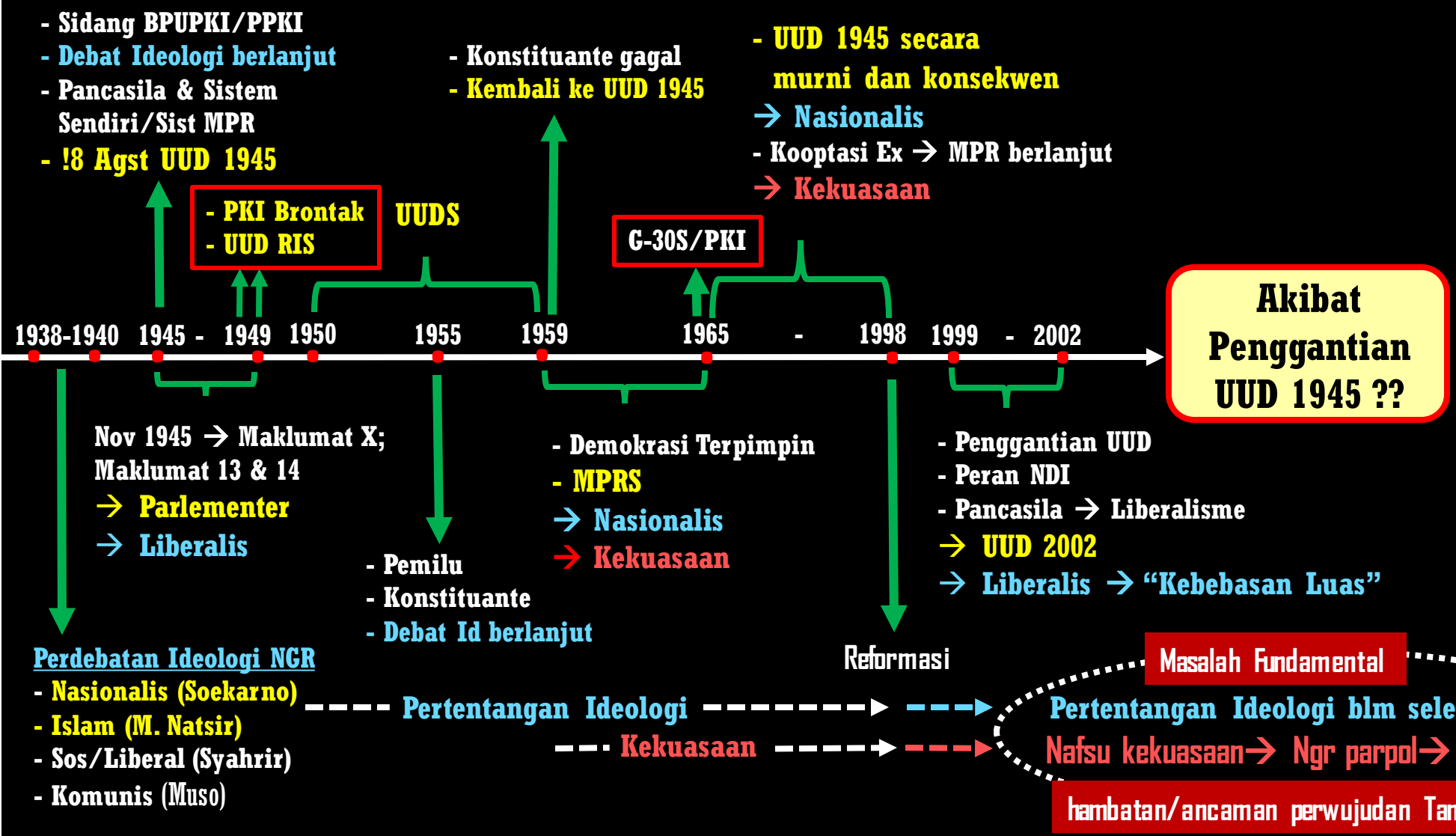
- 1 Rekrutmen UD/UG
- 2 Masa jabatan Presiden
- 3 Tidak pernah diimplementasikan



# Penerapan Konstitusi RI & Permasalahannya



----- Sistem Sendiri belum pernah diimplementasikan ----->



# Tentang Kekuasaan

*"Power Tends To  
Corrupt  
Absolute Power  
Corrupts Absolutely"*

(Lord Acton; 1834-1902)

**UUD 2002 Perluas Orientasi Kekuasaan = Perluas Peluang Korupsi**

# Akibat Penggantian UUD 1945



No	Bidang	UUD 1945	Perubahan	Akibat
1	Ideologi	Pancasila	Individualisme-Liberalisme - Kapitalisme-Kolonialisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Roh "Kemerdekaan" → Kebebasan</li> <li>- Roh "Kebangsaan/Persatuan Indonesia" → Hak/kebebasan individual</li> </ul> <p>→ Masuk Ideologi2 yg bertentangan dgn Pancasila (Liberalisme, Khilafahisme, Marxisme, Radikalisme, dll)</p>
2	Politik/ Demokrasi	Perwakilan	Langsung (ala Liberal) <u>Ciri</u> : voting- <i>free fight</i>	<p>Roh "<u>Persatuan Indonesia</u>" → Hak/Kebebasan Individual</p> <p>Demi kebebasan/HAM, semua ideologi dan aliran boleh hidup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihadapkan pd Indonesia yg majemuk multidimensi dan tingkat kedewasaan berdemokrasi yg belum baik:</li> </ul> <p>→ Kebebasan luas nyaris tanpa batas → Nafsu "berburu kekuasaan" meningkat tajam (bukan pengabdian) → Negara Hukum → Negara Kekuasaan</p>





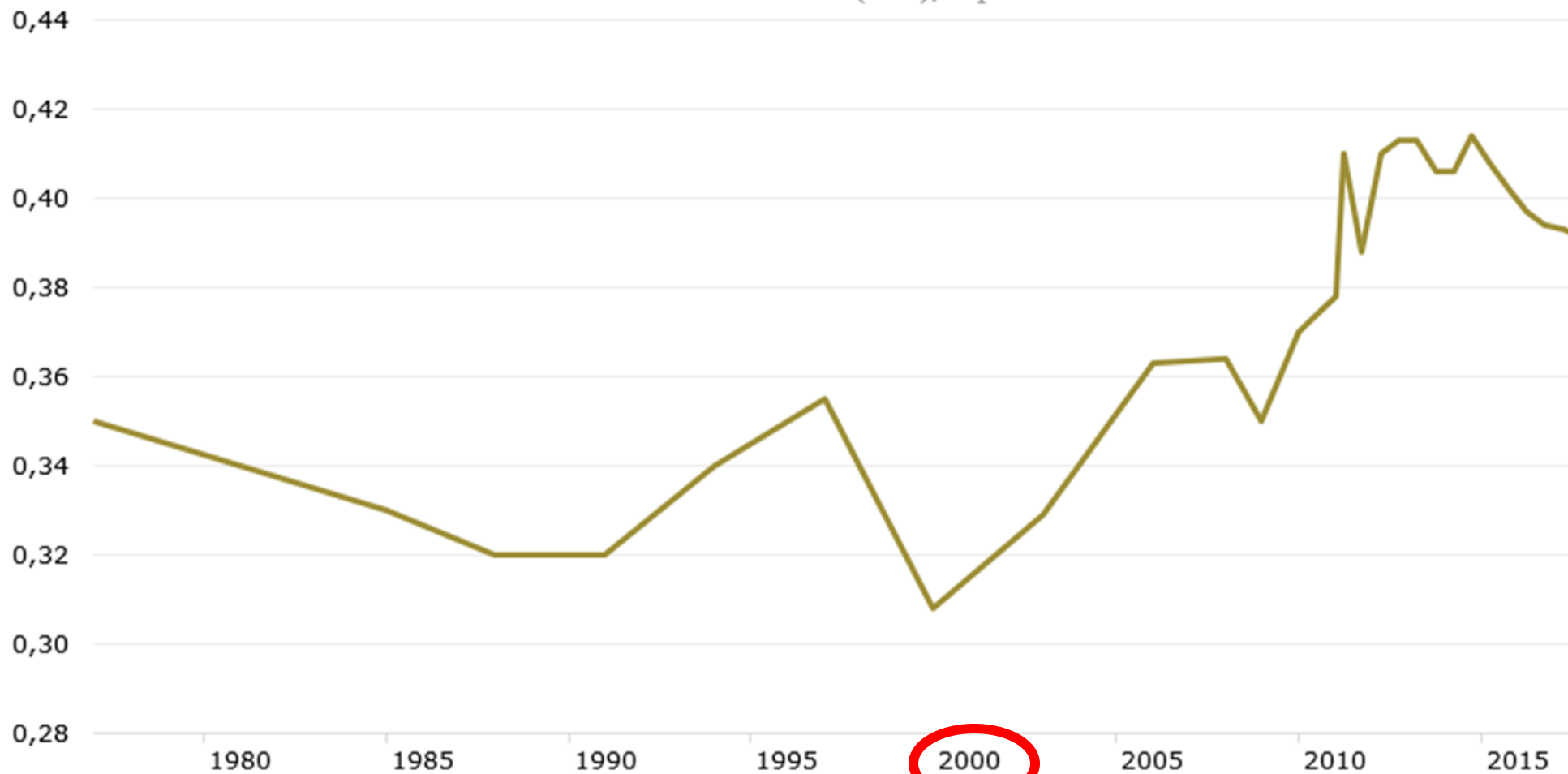
No	Bidang	UUD 1945	Perubahan	Akibat
				<ul style="list-style-type: none"><li>- Menjadi Ngr Parpol</li><li>- Pendulum kekuasaan pada Legislatif (DPR) → Pseudo Presidential, kenyataannya Parlementer</li><li>- Fungsi-fungsi Parpol tidak dijalankan</li><li>- Kepentingan perorangan/golongan mengatasi kepentingan bangsa-negara</li><li>- Berkembang: Machiavellisme, pol uang, korupsi, pol identitas → Kangker ganas demokrasi</li><li>- Oligarki tumbuh subur; termasuk di Parpol; Pol Dinasti/Kapitalis → <b>Orientasinya Kekuasaan</b> → Demokrasi itu sendiri "mati"</li></ul> <p>- Dgn perkembangan Pol Identitas dan kemajuan TI:</p> <p><b>Potensi Konflik → Konflik Nyata → Perpecahan</b></p>



No	Bidang	UUD 1945	Perubahanan	Akibat
3	Ekonomi	Psl 33 Ayat (1-3)	<p>Ditambah Psl 4 Kata "efisiensi" = ciri kapitalisme</p> <p>→ Liberalisasi Ekonomi Bretton Woods (1944) lahirnya Neo kolonialisme Penjajahan: Teritori → Ekonomi</p> <p>↓</p> <p>Ditiru China (Expansionisme Ekonomi)</p>	<p><u>Berkembang Sist Ekonomi Pasar (<i>Laissez faire...</i>)</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemerintah hanya Regulator/tdk campuri pasar</li><li>→ Hukum rimba di pasar, kapitalis menguasai pasar: pedagang kecil, koperasi, pasar tradisional → Mati</li><li>- Privatisasi termasuk BUMN → Kapitalis (asing-lokal) kuasai ekonomi</li><li>→ Kesenjangan ekonomi tambah lebar</li></ul> <p><b>Pemecah-belahan Bangsa secara Ekonomi</b></p>

# Ketimpangan Penduduk Indonesia Diukur dengan Gini Rasio (1976-2017)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), September 2017



**Amandemen  
UUD 1945**



No	Bidang	UUD 1945	Perubahan	Akibat
4	Sosial	Kolektivisme	Hak dan kebebasan individual	<p>Terjadi <u>Kerusakan dan Perpecahan Sosial</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gotong royong, kebersamaan, persaudaraan/kekeluargaan, toleransi → <b>Luntur</b></li><li>- Materialisme, hedonisme, korupsi, nepotisme, fanatisme sempit, radikalisme, kekerasan, terorisme. → <b>Tumbuh subur</b></li><li>- Akibat kemajuan TI, Masuk budaya yg bertentangan dgn Moral Pancasila (pornografi, LGBT, kebebasan ala Barat, peredaran narkoba, dll) → <b>Pertajam dan percepat kerusakan sosial</b></li><li>- Konflik sosial yg dilatari politik, ekonomi, budaya, etnik merebak cepat di banyak kelompok sosial</li></ul> <p><b>- Perpecahan sosial, secara derivatif bisa sampai pada "Perpecahan Bangsa"</b></p>

# Formula Tahap Pembangunan Demokrasi/Partisipasi Rakyat

(Siswa Judo Husodo)



**1** Dari Pemerintah; Oleh Pemerintah; Untuk Rakyat



Proses Pemberdayaan Rakyat → IPM

**2** Dari Pemerintah Bersama Rakyat; Oleh Pemerintah Bersama Rakyat; Untuk Rakyat



Proses Lanjutan Pemberdayaan Rakyat → IPM → Partisipasi rakyat meningkat

**3** Dari Rakyat; Oleh Pemerintah Diawasi Rakyat; Untuk Rakyat

Rakyat Dewasa & Berdaya (Kelas menengah dominan) → Partisipasi rakyat tinggi (Demokrasi Penuh)

Yang terjadi setelah Reformasi: Loncatan instan pada No-3 → Turbulensi Politik

Kontra Produktif  
Thdp Pembangunan  
Tan Nas



**Nasionalisme**



**Patriotisme**

# Fenomena Kekinian → Luntur...!!



**Toleransi**



**Kebersamaan**



**Gotong-royong**



Jogya 3 Maret 2020





# Bila Sistem Demokrasi Pancasila Tidak Ditegakkan

**Disintegrasi...!!!**



**INDONESIA**  
KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pertahanan dan Keamanan  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Sosial dan Budaya  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Teknologi dan Industri  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Transportasi dan Komunikasi  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Lingkungan Hidup dan Energi  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Perencanaan dan Kebijakan  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Hubungan Internasional  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kebudayaan dan Pariwisata  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pemuda dan Olahraga  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Perempuan dan Keluarga Berencana  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Sosial dan Kependudukan  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Statistik dan Sistem Informasi  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Keamanan Siber  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kebijakan dan Strategi  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pengawasan dan Inspeksi  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kerjasama Internasional  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kerja Sama Antarlembaga  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kerja Sama Bilateral  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kerja Sama Multilateral  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kerja Sama Regional  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kerja Sama Global  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kerja Sama dengan Organisasi Internasional  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kerja Sama dengan Organisasi Regional  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kerja Sama dengan Organisasi Bilateral  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kerja Sama dengan Organisasi Multilateral  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kerja Sama dengan Organisasi Regional  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kerja Sama dengan Organisasi Global  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kerja Sama dengan Organisasi Internasional  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kerja Sama dengan Organisasi Regional  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kerja Sama dengan Organisasi Bilateral  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kerja Sama dengan Organisasi Multilateral  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kerja Sama dengan Organisasi Regional  
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kerja Sama dengan Organisasi Global



# "Invisible Hand" dlm Amandemen UUD 1945

**Indikasi**

**UU Referendum Dihapus**

**Penjelasan Dihapus**

**6 Butir yg tdk boleh berubah Dilanggar**

**Kehadiran NDI di Senayan**



**- Liberalis Lokal**  
**- Proxy (al. Cetro)**



**UUD 1945 Diganti UUD 2002**



# Kesimpulan & Rekomendasi

## Kesimpulan

- ❖ Pancasila dan Sistem Sendiri merupakan ideologi dan konstitusi yang cocok bagi kondisi Indonesia
- ❖ Konstitusi yg berlaku (UUD 2002) tdk selaras dengan Nilai - Budaya Bangsa (Pancasila)
- ❖ Sulit/Mustahil peroleh TUNAS & TANNAS yang kuat, sebaliknya dapat menggiring pada perpecahan bangsa

**Rekomendasi**

**Kaji Ulang UUD 2002**





# Peta Situasi Penghambat Kaji Ulang UUD 2002



Upaya Kaji Ulang UUD  
2002 Menghadapi

- Pragmatisme
- Kepentingan Bisnis
- Kepentingan Asing





**TERIMA KASIH**